LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR TAPEUNADANA TAHUN 2024

BANK TAPEUNADANA
PT. Bank Perkreditan Rakyat Tapeunadana

JL. MARGONDA RAYA NO. 263 KEMIRI MUKA - BEJI, DEPOK
TELEPON: 021-7521150

PT BPR TAPEUNADANA
JL. MARGONDA RAYA NO. 263 KEMIRI MUKA - BEJI, DEPOK
Telepon: 021-7521150
Website: www.banktapeunadana.com. Email: tapeunadana@yahoo.com

BAB I
PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanyanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/ POJK.03/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/ SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, maka dengan ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) Tahun 2024.

PT BPR TAPEUNADANA
JL. MARGONDA RAYA NO. 263 KEMIRI MUKA - BEJI, DEPOK
Telepon: 021-7521150
Website: www.banktapeunadana.com. Email: tapeunadana@yahoo.com

BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	DARNIADI
	NIK	:	3201131312620004
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Direktur utama memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, Menciptakan struktur pengendalian internal, dan bertanggung jawab penuh atas keputusan Perseroan untuk kepentingan tujuan Perseroan.		
2.	Nama	:	ASNAWI, SE
	NIK	:	3201130108620003
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Bertanggung jawab untuk mengawal peraturan kebijakan dalam Perseroan dan membuat kebijakan sesuai dengan ketentuan Kebijakan OJK.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
Dewan komisaris memberikan nasihat- nasihat kepada dewan direksi. Pemberian nasihat dan pengawasan dilakukan demi kepentingan dari perseroan tersebut. Dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan kewenangan dengan tidak melanggar Peraturan OJK dan Perundang-undangan			

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	BUSTARI MANSYUR
	NIK	:	3174011707450005
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan pada kebijakan perusahaan. Dewan komisaris dapat melakukan pengawasan pada operasional pengurusan secara umum. Baik hal yang terkait dengan perseroan maupun usaha perseroan. Dewan komisaris dapat memberikan nasihat- nasihat kepada dewan direksi. Pemberian nasihat dan pengawasan dilakukan demi kepentingan dari perseroan tersebut. Dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris akan melakukan tugasnya dengan penuh perhatian, maksud yang baik serta bertanggung jawab demi kepentingan		

	perusahaan tersebut. Dewan komisaris harus ikut bertanggung jawab bila ada kerugian yang dialami perusahaan, jika mereka lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.		
2.	Nama	:	ASTRI NOVANITA ALI
	NIK	:	3174055911720004
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Memberikan perintah pada perusahaan, dengan menerapkan berbagai kebijakan dan tujuan yang luas dari perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya. Memiliki hak untuk mendukung, memilih, mengangkat bahkan memberikan penilaian pada kinerja direksidireksi perusahaan yang dipimpinnya. Bertugas untuk memastikan bahwa sumber keuangan pada perusahaan tersebut cukup. Bertugas untuk melakukan pengesahan pada anggaran tahunan. Bertanggung jawab atas kinerja perusahaan kepada para pemilik saham.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
komisaris merekomindasikan kepada Direksi dalam bentuk nasihat dan saran agar Bank menjalankan dalam bisnisnya menerapkan pinsip kehati-hatian.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sesuai dengan kewenangan dengan tidak melanggar Peraturan OJK dan Perundang-undangan			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
BPR Tapeunadana belum memiliki komite Audit, Komite Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. BPR saat ini memiliki komite kredit yang telah di jalankan dengan baik, untuk selanjutnya BPR akan mempertimbangankan untuk memiliki komite tersebut, sesuai dengan kebutuhan di BPR.	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite	:	BPR saat ini hanya memiliki komite kredit, anggota komite kredit yang hadir yaitu Direktur Utama, Kepala Bagian Kredit, Kredit Analist, Kepala Bagian Kredit Admin Kredit, Kepala Divisi Bisnis, dan Direktur Kepatuhan.

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Program kerja dan Realisasi program kerja komite saat ini belum ada, dan akan di pertimbangankan sesuai dengan kebutuhan BPR.			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DARNIADI	3201131312620004	Rp0	0%
2.	ASNAWI, SE	3201130108620003	Rp10.000.000	0.12%

Penjelasan Lebih Lanjut :
Direktur utama tidak memiliki saham di BPR, sementara di Direktur Kepatuhan memiliki saham sebesar 0.12%.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DARNIADI	3201131312620004	-	-	0%
2.	ASNAWI, SE	3201130108620003	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	DARNIADI	3201131312620004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASNAWI, SE	3201130108620003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham lainnya.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	DARNIADI	3201131312620004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASNAWI, SE	3201130108620003	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham lainnya.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	BUSTARI MANSYUR	3174011707450005	Rp216.000.000	2.49%
2.	ASTRI NOVANITA ALI	3174055911720004	Rp5.807.000.000	66.94%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris memiliki saham lebih besar dari Komisaris utama.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	BUSTARI MANSYUR	3174011707450005	-	-	0%
2.	ASTRI NOVANITA ALI	3174055911720004	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada Perusahaan lain, saat ini hanya memiliki saham di BPR Tapeunadana					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	BUSTARI MANSYUR	3174011707450005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASTRI NOVANITA ALI	3174055911720004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Direksi, Dewan komisaris, dan Pemegang Saham lainnya.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	BUSTARI MANSYUR	3174011707450005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	ASTRI NOVANITA ALI	3174055911720004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan komisaris, dan Pemegang Saham lainnya. Yang sebelumnnya pada pelaporan Tata Kelola tahun 2022 Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp45.000.000	2	Rp22.000.000
2.	Tunjangan	2	Rp16.650.000	0	Rp1.833.333
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp61.650.000		Rp23.833.333
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Remunerasi yang di berikan BPR terhadap Dewan Komisaris dan Direksi telah di setujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk Direksi di berikan tunjangan berupa uang bensin, tol dan pulsa setiap bulannya, Dewan Komisaris diberi tunjangan jabatan dan obat.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil Operasional (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
BPR memberikan kendaraan operasional untuk Direksi tetapi dapat digunakan untuk kegiatan Operasional BPR, serta BPJS Kesehatan			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	5 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Pemberian gaji ini di sesuaikan dengan masa kerja serta jabatan, dan sudah termasuk dengan tunjangan yang telah di berikan BPR dalam waktu 1 tahun.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	17 April 2024	8	Financial Highlights, Penyelesaian NPL, dan Informasi Lainnya
2.	28 Mei 2024	6	Presentasi Penerapan Apu & PPT, Financial Highlights, Penyelesaian NPL, dan Informasi Lainnya

3.	29 Juli 2024	4	Financial Highlights, Penyelesaian NPL, dan Informasi Lainnya
4.	11 September 2024	8	Financial Highlights, Penyelesaian NPL, Informasi Lainnya, dan Update POJK No. 7 Tahun 2024
5	19 Desember 2024	8	Financial Highlights, Penyelesaian NPL, dan Informasi Lainnya
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
Rapat di adakan 5 kali dalam 1 tahun yang membahas perkembangan BPR, laporan keuangan, serta rencana kedepannya untuk setiap penyelesain kredit bermasalah. Rapat ini di hadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	BUSTARI MANSYUR	3174011707450005	2	3	100%
2.	ASTRI NOVANITA ALI	3174055911720004	0	4	90%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Rapat yang di hadiri Dewan Komisaris melalui zoom dan tatap muka.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Dalam semester pertama ini BPR tidak ada penyimpangan atau fraud oleh karyawan, direksi atau dewan komisaris yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR								

PT BPR TAPEUNADANA
JL. MARGONDA RAYA NO. 263 KEMIRI MUKA - BEJI, DEPOK
Telepon: 021-7521150
Website: www.banktapeunadana.com. Email: tapeunadana@yahoo.com

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
BPR saat ini tidak dalam menghadapi permasalahan hukum yang dapat merugikan BPR.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
BPR tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
BPR Tapeunadana tidak melakukan kegiatan untuk Pemberian Dana untuk kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik.					

Depok, 24 Januari 2024

PT BPR TAPEUNADANA